



Transformasi Dualisme Pendidikan dan Politik Legitimasi Pengetahuan Islam di Indonesia dari Kolonial hingga Reformasi

Muhammad Bahtiar Harsaputra¹, Ni'matuz Zuhroh^{2*}, Moh. Padil³

^{1,3}Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kota Malang, Indonesia

^{2*}Pendiakn IPS, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kota Malang, Indonesia

Email: ¹250101210010@student.uin-malang.ac.id, ^{2*}zuhroh@pips.uin-malang.ac.id, ^{3*}padil@pai.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan dualisme pendidikan di Indonesia yang melahirkan ketimpangan legitimasi antara pengetahuan Islam dan pengetahuan modern sejak era kolonial hingga reformasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi dualisme pendidikan serta politik legitimasi pengetahuan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan historis-sosiologis. Data diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan dan dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi teoritis, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pendidikan merupakan konstruksi historis yang menempatkan pendidikan modern sebagai pemegang legitimasi simbolik dominan, sementara pendidikan Islam mengalami subordinasi epistemologis. Pada era reformasi, pengakuan formal terhadap madrasah, transformasi IAIN menjadi UIN, dan integrasi ilmu memperkuat posisi kelembagaan pendidikan Islam. Namun, legitimasi keilmuan masih didominasi paradigma pendidikan modern sehingga dualisme epistemologis belum sepenuhnya teratasi. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan Islam telah meningkatkan legitimasi kelembagaan, tetapi belum mengubah secara fundamental struktur kekuasaan pengetahuan yang diwariskan sejak masa kolonial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi epistemologi Islam dan ilmu modern dalam kebijakan pendidikan nasional. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data kepustakaan sehingga belum menggambarkan praktik negosiasi legitimasi pengetahuan Islam pada level empiris dan institusional secara langsung.

Kata Kunci: Dualisme Pendidikan, Legitimasi Pengetahuan, Pendidikan Islam, Pierre Bourdieu, Reformasi

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak sekadar menyampaikan informasi atau menyebarkan pengetahuan. Pendidikan juga merupakan arena politik legitimasi yang menentukan jenis dan bentuk pengetahuan mana yang dipandang sah (Heleta & Chasi, 2024). Dalam praktiknya, sistem pendidikan tidak hanya mengajar; ia memilih pengetahuan yang diakui, menyingkirkan yang dianggap tidak relevan, dan memberi label pada sebagian tradisi sebagai ketinggalan zaman. Dari proses seleksi ini muncul hierarki pengetahuan yang berlandaskan kriteria modernitas. Kurikulum resmi, gelar, sertifikasi, dan standar akademik menjadi rujukan yang mengangkat ilmu modern, rasional, dan universal, sementara tradisi keilmuan lain sering diperlakukan sebagai pengetahuan yang tidak sejajar secara metodologis dan institusional (Perwez, 2025).

Melalui lensa Pierre Bourdieu, mekanisme tersebut adalah bentuk legitimasi simbolik. Otoritas pengetahuan tidak hanya ditegakkan lewat kekuasaan institusional, tetapi juga lewat pengakuan sosial yang tampak wajar dan sah. Sekolah dan lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat produksi dan reproduksi modal budaya tertentu, terutama modal yang berbasis pengetahuan Barat, bahasa ilmiah, dan keterampilan modern (Pamungkas et al., 2026). Mereka yang berhasil menginternalisasi modal budaya dominan memperoleh keunggulan simbolik yang memperkuat posisi kelas sosial dan politik mereka (Reay, 2022). Sebaliknya, pengetahuan yang tidak sesuai dengan kerangka legitimasi ini cenderung terpinggirkan baik dalam kurikulum maupun dalam hierarki profesional (Chande, 2023). Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pendekatan Bourdieusian membantu menjelaskan bagaimana legitimasi pengetahuan Islam

dibentuk bukan hanya oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh struktur modal budaya dan dominasi epistemik yang berlanjut sejak era kolonial hingga masa reformasi.

Modernitas yang dibawa kolonialisme menanamkan anggapan bahwa ilmu yang sah harus bersifat objektif, terukur, dan dihasilkan melalui metode ilmiah yang terstandarisasi (Kutsi & Arifin, 2023). Dalam praktiknya, paradigma ini meminggirkan banyak bentuk keilmuan Islam yang tidak sepenuhnya mengikuti format akademik Barat, misalnya takhrij hadis, tafsir, fiqh, dan tasawuf yang bergantung pada konsensus ulama, ijazah sanad, dan tradisi lisan (Lumbard, 2025). Dengan demikian, dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama berfungsi sebagai relasi kekuasaan: ilmu umum dilegitimasi melalui kurikulum, gelar, dan sertifikasi resmi, sementara ilmu agama mengalami degradasi posisi dalam hirarki sosial dan birokrasi negara (Chande, 2023). Pendidikan dalam kerangka ini menjadi saluran ideologi modernitas yang menegaskan bahwa legitimasi ilmu berada pada institusi yang menggunakan rujukan ilmiah Barat, sedangkan keilmuan Islam harus berjuang mendapatkan pengakuan dalam format yang sama.

Dualisme pendidikan di Indonesia bukan fenomena spontan, ia merupakan warisan struktur sosial-politik kolonial (Yentür, 2024). Sistem pendidikan Belanda di Hindia Belanda memproduksi dua jalur terpisah (Kusdiana, 2023). Jalur pertama adalah pendidikan sekuler Barat yang menyiapkan birokrat dan tenaga profesional modern. Jalur kedua adalah pendidikan agama yang sebagian besar berada di luar kendali langsung pemerintah kolonial (Yentür, 2024). Sekolah Barat membuka akses ke kelas sosial baru, yaitu pegawai negeri, guru, dan profesional yang diakui menurut standar kolonial (Thang et al., 2024). Sementara pesantren tetap menjadi pusat pengajaran keislaman tradisional yang semakin terdesak secara sosial dan ekonomi karena keterbatasan akses ke jalur karier modern yang diatur negara (Nurazizah et al., 2025). Dualisme ini bersifat struktural sekaligus epistemologis: pesantren mempertahankan tradisi keilmuan klasik, sedangkan sekolah Barat mengadopsi kurikulum dan metodologi Eropa modern.

Dinamika tersebut melahirkan dikotomi ilmu umum versus ilmu agama yang berdampak jangka panjang. Ilmu umum mulai diasosiasikan dengan modernitas, rasionalitas, kegunaan praktis, dan produktivitas ekonomi, sedangkan ilmu agama dipersepsikan sebagai ranah spiritual dan normatif yang kurang relevan bagi pembangunan material (Kosim et al., 2023). Akibatnya, lulusan sekolah Barat memperoleh legitimasi formal, kehormatan sosial, dan akses ke posisi birokratik dan profesional. Lulusan pesantren, meskipun dihormati dalam ranah keagamaan, seringkali tidak memiliki legitimasi formal yang setara dalam konteks profesional modern (Nurtawab & Wahyudi, 2022). Dampak dualisme ini terlihat jelas dalam marginalisasi pendidikan Islam di ranah kebijakan dan struktur kelas sosial. Pesantren dipandang tradisional dan tertinggal sehingga mengalami kesulitan mengakses sumber daya, otoritas kurikuler, dan pengakuan ilmiah yang dimiliki sistem pendidikan sekuler.

Subordinasi epistemologi Islam menjadi lebih nyata pada era pasca-kolonial, khususnya masa Orde Baru, ketika sistem pendidikan nasional menekankan ilmu umum dan modernisasi (Chande, 2023). Integrasi kurikulum ke dalam administrasi negara, mekanisme sertifikasi profesional, dan standar akreditasi secara implisit memosisikan ilmu agama sebagai pelengkap yang tidak setara. Legitimasi pengetahuan bergeser dari ulama ke negara dan lembaga pendidikan yang mengadopsi model Barat (Ridwan, 2022). Dampaknya, ilmu yang berkembang dalam tradisi pesantren dianggap tidak memenuhi kriteria ilmiah modern sehingga kurang diakui di tingkat akademis nasional dan internasional (Mardatillah et al., 2025). Sementara itu, legitimasi sosial pendidikan modern terus meningkat sehingga menjadi jalur utama bagi mobilitas sosial dan karier profesional.

Era reformasi membawa perubahan paradigma yang signifikan (Pirdaus et al., 2023). Demokratisasi, desentralisasi, dan pluralisme politik membuka ruang bagi pengakuan madrasah dan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Mubadillah, 2024). Berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa madrasah dan satuan pendidikan Islam lain merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang sama (Asiah et al., 2023). Pengakuan formal ini menjadi koreksi terhadap marginalisasi pada masa Orde Baru. Namun integrasi yang terjadi lebih bersifat administratif dan struktural. Dikotomi epistemologis antara ilmu umum dan ilmu agama masih bertahan. Kurikulum madrasah seringkali harus mengadopsi kerangka ilmu umum yang sebagian besar diwarisi dari tradisi Barat sehingga epistemologi Islam belum menjadi rujukan primer dalam pengembangan pengetahuan (Purba, 2025). Kurikulum madrasah, misalnya, masih harus mengadopsi kerangka ilmu umum yang sebagian besar diwarisi dari tradisi Barat, sehingga epistemologi Islam tidak benar-benar dijadikan rujukan primer dalam pengembangan pengetahuan.

Meskipun banyak penelitian membahas sejarah pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dualisme pendidikan dari masa kolonial hingga reformasi dan kajian tentang madrasah serta pesantren, tinjauan terhadap publikasi mutakhir masih menunjukkan celah penting. Studi literatur sistematis tentang dualisme pendidikan (Hidayati et al., 2023). mengindikasikan bahwa integrasi kerangka sosiologis, khususnya teori Pierre Bourdieu tentang legitimasi simbolik, modal budaya, dan reproduksi sosial untuk menjelaskan transformasi dualisme pendidikan dan politik legitimasi pengetahuan Islam masih sangat terbatas. Temuan studi terbaru tentang dikotomi pendidikan menyoroti minimnya analisis struktural yang menjelaskan

bagaimana sekolah modern berfungsi sebagai arena dominasi modal budaya dan bagaimana pendidikan Islam mengalami subordinasi epistemologis sejak era kolonial hingga reformasi (Rizal et al., 2024). Akibatnya, banyak kajian cenderung bersifat deskriptif atau normatif filosofis dan kurang memberi perhatian pada mekanisme sosiologis reproduksi legitimasi pengetahuan (Habibi & Sholikhah, 2025). Kekurangan ini menjadi masalah mendesak karena ketimpangan struktural antara ilmu umum dan ilmu agama menimbulkan tantangan etis dan sosial yang berkelanjutan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa dikotomi epistemologis tetap bertahan meskipun ada pengakuan formal terhadap madrasah.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis konstruksi dualisme pendidikan di Indonesia dari era kolonial hingga reformasi. Studi ini menelusuri bagaimana politik pendidikan kolonial Belanda, munculnya sekolah modern, serta posisi pesantren dan madrasah membentuk struktur dualisme yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian juga berupaya menjelaskan bagaimana dualisme mereproduksi legitimasi pengetahuan Islam dalam konteks di mana sekolah modern menjadi arena dominasi modal budaya dan pendidikan Islam mengalami subordinasi epistemologis yang berlanjut hingga era reformasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Pierre Bourdieu untuk menganalisis transformasi legitimasi pengetahuan Islam, khususnya dalam memahami bagaimana struktur kekuasaan pengetahuan dan ketimpangan sosial direproduksi melalui institusi pendidikan, serta bagaimana reformasi mengubah legitimasi kelembagaan tanpa sepenuhnya menghapus dualisme epistemologis yang masih bertahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji transformasi dualisme pendidikan dan politik legitimasi pengetahuan Islam di Indonesia dari era kolonial hingga reformasi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan historis-sosiologis: pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan Islam dari masa kolonial, pascakemerdekaan, Orde Baru, hingga reformasi, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan, dominasi pendidikan modern, serta mekanisme reproduksi sosial dalam legitimasi pengetahuan Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur secara sistematis terhadap karya akademik yang relevan. Analisis data dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi temuan berdasarkan tema utama, interpretasi teoritis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu, serta penarikan kesimpulan yang mengintegrasikan dimensi historis dan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Dualisme Pendidikan di Indonesia dari Era Kolonial hingga Reformasi

Dualisme pendidikan di Indonesia bukan bentuk pluralisme lembaga yang netral. Ia merupakan konstruksi historis yang dibentuk oleh proyek politik pendidikan kolonial Belanda, lalu direproduksi oleh negara pasca-kemerdekaan, dan akhirnya diadaptasi dalam kebijakan era reformasi (Syarif et al., 2025). Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda membangun sistem pendidikan yang hierarkis dan terpolarisasi. Di satu sisi ada jalur pendidikan sekuler yang ditujukan bagi elit pribumi dan golongan administratif. Di sisi lain ada jalur pendidikan agama tradisional yang kebanyakan berada di luar struktur pendidikan resmi negara (Warisno et al., 2023). Sekolah Eropa, sekolah Hindia Belanda, dan sekolah rakyat dihadirkan sebagai pusat produksi birokrat dan profesional yang loyal kepada kekuasaan kolonial sekaligus menjadi simbol modernitas dan otoritas (Thang et al., 2024). Pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan kolonial sehingga posisinya relatif otonom namun terpinggirkan dari akses sumber daya negara dan legitimasi formal.

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, konfigurasi ini dapat dibaca sebagai proses konstruksi legitimasi simbolik yang menempatkan ilmu Barat sebagai modal budaya dominan (Fauzi et al., 2026). Sekolah modern berfungsi bukan hanya untuk mentransfer kurikulum, tetapi juga untuk memproduksi dan mereproduksi modal budaya yang dihargai oleh kekuasaan kolonial, seperti penguasaan bahasa administratif, etos birokratis, dan keterampilan rasional instrumental (Kosim et al., 2023). Lulusan sekolah tersebut tidak sekadar memperoleh pengetahuan, mereka juga membangun posisi sosial yang lebih kuat karena modal budaya mereka selaras dengan kebutuhan administrasi kolonial (Sumanti, 2024). Dengan demikian pendidikan modern memperoleh legitimasi simbolik yang dominan karena dianggap penentu kemajuan, keteraturan, dan kapasitas pengelolaan masyarakat dalam logika kekuasaan kolonial. Sebaliknya pendidikan Islam berbasis pesantren dan lembaga tradisional tidak sepenuhnya mengikuti standar ilmiah dan administratif negara sehingga posisinya ter subordinasi dalam struktur pengetahuan kolonial.

Dari perspektif Bourdieu, dualisme pendidikan bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi konfigurasi kekuasaan simbolik yang menetapkan jenis pengetahuan mana yang sah dan bernilai tinggi (Kettley & Murphy, 2021). Modal budaya yang dihasilkan sekolah modern, misalnya penguasaan bahasa resmi dan keterampilan administratif, lebih mudah diakui sehingga pemilikinya memperoleh keunggulan

sosial (Thang et al., 2024). Sekolah modern menjadi pusat reproduksi sosial karena lulusannya memperoleh akses ke posisi kekuasaan, status profesional, dan mobilitas sosial. Sebaliknya pesantren dan lembaga tradisional, meskipun menghasilkan modal budaya keagamaan yang kuat, tidak mendapat pengakuan yang setara dalam struktur kekuasaan kolonial (Fatmawati & Maftuh, 2026). Oleh karena itu pengetahuan keagamaan dianggap bernilai moral dan spiritual tetapi kurang dihargai dalam kerangka administratif dan negara.

Munculnya sekolah modern menandai pergeseran dari pendidikan berbasis komunitas menuju pendidikan formal yang tersentralisasi dan kelembagaan (Delvia et al., 2025). Sekolah modern hadir sebagai instrumen modernisasi yang menegaskan bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai melalui pengetahuan Barat dan struktur kelembagaan yang rapi (Puspita et al., 2025). Sekolah ini menjadi pusat legitimasi simbolik bagi ilmu yang dianggap rasional, praktis, dan produktif secara ekonomi, sementara ilmu tradisional, terutama keagamaan, dipandang kurang relevan untuk pembangunan material (Abdullah et al., 2026). Oleh karena itu sekolah modern memproduksi modal budaya yang dihargai sehingga lulusannya dianggap lebih siap menghadapi tuntutan kehidupan modern dibandingkan lulusan lembaga tradisional.

Analisis Bourdieu menegaskan bahwa sekolah modern adalah arena dominasi modal budaya karena di sana jenis pengetahuan yang bernilai tinggi diproduksi, diakui, dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Atli & Cimrin, 2023). Siswa yang menginternalisasi modal budaya dominan, seperti penguasaan bahasa resmi dan etos kerja modern, memperoleh keunggulan sosial yang mempermudah mobilitas mereka di masa depan (Amka, 2024). Dalam konteks kolonial lulusan sekolah modern lebih mudah mengakses birokrasi dan profesi profesional dibandingkan lulusan pesantren, walau lulusan pesantren memiliki otoritas keagamaan yang kuat di masyarakat (Kutsi & Arifin, 2023). Dengan demikian sekolah modern menjadi pusat reproduksi sosial karena kesuksesan sosial tergantung pada posisi kelembagaan yang diperoleh, bukan hanya bakat individu.

Posisi pesantren dan madrasah pada masa kolonial menunjukkan bahwa dualisme pendidikan bukan hanya struktur kelembagaan, tetapi juga konfigurasi epistemologis dan kekuasaan yang berkelanjutan (Kosim et al., 2023). Pesantren beroperasi otonom dan berbasis jaringan ulama, sanad, dan komunitas lokal sehingga relatif terlepas dari birokrasi pendidikan kolonial (Lumbard, 2025). Madrasah yang muncul pada awal abad ke-20 mencoba merespons modernitas dengan menambahkan unsur kurikulum modern ke dalam pengajaran agama, tetapi tetap belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan resmi kolonial (Purba, 2025). Oleh karena itu ilmu yang dihasilkan di pesantren dan madrasah dihargai secara keagamaan namun tidak diperlakukan sama dalam struktur pengetahuan negara sehingga mengalami subordinasi dalam hirarki resmi.

Berdasarkan kerangka Bourdieu, legitimasi keilmuan diatur melalui pengakuan negara sementara sekolah modern menjadi pusat produksi keilmuan yang dianggap bernilai tinggi. Lembaga pendidikan keagamaan tradisional diposisikan sebagai tambahan yang berada di luar pusat kekuasaan ilmiah (Suprajitno, 2022). Madrasah berada dalam ruang negosiasi ketika berusaha menyesuaikan diri dengan standar negara namun tetap terpinggirkan dari pusat produksi modal budaya dominan (Kusuma et al., 2024). Dengan kata lain sekolah modern mendominasi produksi modal budaya sementara pesantren dan madrasah diletakkan dalam struktur kelembagaan yang tidak sepenuhnya setara sehingga keilmuan keagamaan mengalami subordinasi epistemologis.

Pascakemerdekaan upaya penataan ulang sistem pendidikan nasional tetap menginternalisasi warisan kolonial melalui dominasi ilmu umum dan model sekolah modern (Pirdaus et al., 2023). Kebijakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru tetap menempatkan ilmu umum sebagai pusat kurikulum sehingga madrasah harus menyesuaikan diri dengan standar keilmuan negara (Fatoni et al., 2026). Madrasah ditempatkan sebagai jalur alternatif yang berada di luar pusat produksi pengetahuan utama sehingga posisi keilmuannya tetap tertekan meskipun ada pengakuan formal melalui penyesuaian kurikulum (Jayadi et al., 2022). Dalam kerangka Bourdieu hal ini menunjukkan bahwa dualisme pendidikan terus menjadi mesin reproduksi sosial karena sekolah modern tetap memproduksi modal budaya yang bernilai tinggi sehingga lulusan sekolah umum memiliki keunggulan sosial dibandingkan lulusan madrasah yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui luas.

Dengan demikian sistem pendidikan nasional pascakemerdekaan tidak menghapus dualisme tetapi mereproduksi dan mengukuhkan posisi kekuasaan sekolah modern sebagai pusat dominasi modal budaya (Wafa et al., 2025). Reproduksi sosial terjadi melalui internalisasi dan pewarisan modal budaya yang berbeda antar institusi sehingga ketimpangan status sosial dan keilmuan terus berlanjut (Tandangga & Allolayu, 2022). Sekolah modern tetap menjadi pusat legitimasi simbolik bagi ilmu yang dianggap sah, sementara pendidikan Islam berada dalam struktur kelembagaan yang dinamis tetapi tidak setara sehingga subordinasi epistemologis berlanjut.

Transformasi pendidikan Islam pada era reformasi menunjukkan bahwa dualisme ini tidak statis, tetapi dinamis, dan mengalami perubahan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan (Sumanti, 2024).

Reformasi membawa otonomi daerah, desentralisasi, pengakuan madrasah, dan pengembangan perguruan tinggi keagamaan seperti IAIN yang bertransformasi menjadi UIN (Muthohirin et al., 2025). Perubahan ini memberikan pengakuan kelembagaan yang lebih luas bagi pendidikan Islam sehingga posisinya semakin kuat meskipun struktur keilmuan dan kebijakan masih banyak dipengaruhi jalur pendidikan umum (Mubarak et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu pengakuan formal tersebut menandai negosiasi ulang posisi keilmuan Islam sehingga legitimasi simboliknya meningkat, meskipun tetap berada dalam struktur kekuasaan ilmiah yang didominasi sekolah modern.

Dengan demikian perubahan posisi pendidikan Islam pada era reformasi mencerminkan cara negara menegosiasikan ulang keilmuan Islam sehingga pendidikan keagamaan tidak sepenuhnya berada di luar pusat kekuasaan ilmiah tetapi menjadi bagian dari struktur kelembagaan yang diakui secara resmi. (Chande, 2023). Namun struktur kekuasaan ilmiah yang dominan tidak lenyap sehingga keilmuan Islam masih beroperasi dalam kerangka kelembagaan yang diatur oleh sekolah modern meskipun posisinya kini lebih kuat (Addina & Hanif, 2025). Secara garis besar dualisme pendidikan di Indonesia dari era kolonial hingga reformasi dapat dibaca sebagai konstruksi historis yang berkelanjutan, di mana pendidikan modern memperoleh legitimasi simbolik dominan sementara pendidikan Islam mengalami perubahan kelembagaan tetapi tetap menghadapi subordinasi epistemologis yang berkelanjutan.

B. Reproduksi Legitimasi Pengetahuan Islam dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Dalam sistem pendidikan Indonesia, hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Indonesia melampaui perbedaan isi kurikulum. Hubungan itu juga mencerminkan konfigurasi kekuasaan dalam produksi dan legitimasi pengetahuan (Husaeni, 2023). Sejak masa Orde Baru, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan modern menempatkan ilmu umum, terutama ilmu eksakta, sosial, dan teknik, sebagai poros kurikulum nasional. Ilmu agama sering diklasifikasikan sebagai muatan penunjang yang bersifat normatif dan moral (Anjasari, 2022). Dalam praktiknya, lulusan sekolah umum yang mengikuti jalur pendidikan formal berbasis kurikulum nasional lebih mudah memperoleh pengakuan resmi, akses ke birokrasi, profesi, dan industri, serta reputasi karier yang lebih tinggi dibandingkan lulusan lembaga pendidikan berbasis keislaman. Lulusan terakhir ini mungkin memiliki otoritas keagamaan kuat di komunitasnya, tetapi umumnya kurang diakui dalam ranah profesional formal (Chande, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur keilmuan diatur bukan hanya oleh kebijakan, tetapi juga oleh logika kekuasaan yang menentukan jenis ilmu yang bernilai tinggi secara sosial dan ekonomi.

Melalui lensa Pierre Bourdieu, fenomena tersebut dapat dibaca sebagai bentuk reproduksi modal budaya, di mana sekolah modern menjadi pusat produksi dan distribusi modal budaya yang dihargai oleh negara, pasar, dan struktur sosial yang lebih luas (Kosim et al., 2023). Modal budaya, menurut Bourdieu, bukan semata pengetahuan formal. Modal budaya juga mencakup cara berpikir, keterampilan, etos, dan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi dan kehidupan modern (Xie, 2025). Di Indonesia, sekolah umum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri berfungsi sebagai institusi yang menginternalisasi dan menyebarkan modal budaya ini sehingga lulusannya memperoleh keunggulan dalam persaingan sosial dan karier (Chande, 2023). Sebaliknya, ilmu agama di pesantren dan madrasah memiliki modal budaya sendiri, seperti otoritas keagamaan, sanad ilmu, tradisi lisan, dan kredensial moral, namun modal tersebut tidak selalu mendapat pengakuan setara dalam struktur keilmuan resmi karena tidak sepenuhnya sesuai dengan format dan standar sekolah modern (Akhiruddin et al., 2025). Dengan demikian, dualisme pendidikan memperkuat legitimasi ilmu umum dan meminggirkan keilmuan Islam, sehingga posisi pendidikan Islam menjadi ambigu dan ambivalen.

Ilmu umum yang menjadi poros kurikulum nasional menempatkan sekolah modern bukan hanya sebagai tempat pengajaran, tetapi juga sebagai arena legitimasi keilmuan (Suprajitno, 2022). Pendidikan modern menjadi simbol prestise sosial karena lulusannya lebih mudah mengakses status profesional, jabatan birokrasi, dan posisi sosial yang diakui luas. Dari perspektif Bourdieu, sekolah modern mendominasi produksi modal budaya karena menghasilkan individu dengan keterampilan, orientasi, dan gaya yang selaras dengan kebutuhan kekuasaan dan ekonomi modern (Sumanti, 2024). Modal budaya seperti penguasaan bahasa administratif, rasionalitas instrumental, dan keterampilan teknis dinilai lebih tinggi daripada modal budaya keagamaan yang dihasilkan pesantren dan madrasah. Oleh sebab itu keberhasilan sosial sering diukur berdasarkan latar belakang sekolah umum, bukan latar keilmuan keagamaan.

Posisi madrasah dalam sistem pendidikan menunjukkan dinamika reproduksi legitimasi keilmuan yang berkelanjutan (Rahmadani, 2023). Kebijakan seperti SKB Tiga Menteri pada 1975 dan perluasan regulasi pasca reformasi memberi pengakuan formal terhadap madrasah melalui penyamaan ijazah, penyesuaian komposisi kurikulum, dan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional (Kosim et al., 2023). Dalam praktiknya madrasah menempati posisi ganda. Di satu sisi lembaga ini harus menyesuaikan diri dengan standar ilmu umum, bahasa pengantar, dan format keilmuan resmi. Di sisi lain madrasah berupaya mempertahankan identitas keagamaan sebagai nilai inti yang membedakannya dari

sekolah umum (Anas et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu, madrasah beroperasi di arena reproduksi modal budaya di mana mereka menghasilkan lulusan dengan kombinasi modal budaya keagamaan dan modal budaya modern, sekaligus menegosiasikan legitimasi mereka dalam struktur kelembagaan yang didominasi sekolah umum. Dengan demikian madrasah menjadi arena negosiasi legitimasi, bukan sekadar arena reproduksi yang sederhana.

Dalam perspektif Bourdieu, perubahan posisi madrasah menunjukkan bahwa reproduksi sosial berlangsung secara tidak linier namun berkelanjutan dan dinamis (Sumanti, 2024). Keluarga yang memiliki akses ke sekolah modern biasanya berasal dari latar sosial-ekonomi lebih kuat sehingga mampu mewariskan modal budaya yang cocok dengan tuntutan sistem pendidikan modern (Akhiruddin et al., 2025). Sebaliknya, keluarga yang bergantung pada pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah swasta, sering kali lebih rentan secara ekonomi sehingga keberhasilan pendidikan mereka bergantung pada kemampuan menegosiasikan modal budaya keagamaan ke dalam sistem yang dihargai oleh jalur karier profesional dan birokrasi (Anas et al., 2026). Dalam konteks ini dualisme pendidikan mereproduksi relasi kekuasaan, di mana sekolah modern menjadi pusat dominasi modal budaya dan prestise, sedangkan pendidikan Islam terus menegosiasikan legitimasi baik di tingkat kelembagaan maupun praktik sehari-hari.

Relasi antara pendidikan dan status sosial menegaskan bahwa reproduksi modal budaya berjalan melalui struktur kelembagaan yang berbeda (Gamsu, 2022). Lulusan sekolah umum, terutama perguruan tinggi negeri, cenderung menempati posisi lebih tinggi dalam pasar kerja, jabatan publik, dan jaringan profesional dibandingkan lulusan lembaga pendidikan berbasis keislaman yang tidak memiliki jalur formal ke dalam sistem keilmuan modern dan birokrasi negara (Rodin et al., 2025). Dalam kerangka Bourdieu ini berarti sekolah modern bukan sekadar lembaga edukatif tetapi juga mesin reproduksi status sosial bagi pemilik modal budaya yang diakui negara dan pasar. Penguasaan bahasa administratif, rasionalitas, dan keterampilan teknis memberi akses lebih mudah ke mobilitas sosial vertikal (Thang et al., 2024). Dalam konteks ini, pendidikan modern menjadi simbol prestise sosial, sekaligus menjadi alat reproduksi kekuasaan yang menempatkan segelintir kelompok sebagai pemilik modal budaya dominan.

Dalam kerangka yang sama, pendidikan Islam berada dalam proses negosiasi yang terus berjalan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas (Latief et al., 2021). Lulusan pesantren dan madrasah yang kurang memiliki sertifikasi atau gelar yang diakui secara luas sering mengalami kesulitan menempati posisi strategis di birokrasi, profesi, atau industri formal meskipun memiliki otoritas keagamaan kuat di komunitas lokal (Kutsi & Arifin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi keilmuan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengetahuan tetapi juga oleh keterhubungan dengan struktur kelembagaan dan kekuasaan. Oleh karena itu keilmuan yang dihasilkan pesantren dan madrasah sering diakui terutama dalam konteks keagamaan, bukan dalam ranah keilmuan resmi nasional (Gauchat, 2023). Dengan demikian dualisme pendidikan memperkuat posisi sekolah modern sebagai pusat dominasi modal budaya sementara pendidikan Islam terus menegosiasikan legitimasi sosial dan kelembagaan.

Dalam gambaran yang lebih luas hubungan pendidikan dan status sosial menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jalur pendidikan yang ditempuh (Akhiruddin et al., 2025). Keluarga yang mampu memasukkan anak ke jalur pendidikan umum, khususnya perguruan tinggi negeri, cenderung mewariskan modal budaya yang memperkuat posisi sosial anak mereka (Sumanti, 2024). Sebaliknya keluarga yang mengandalkan pendidikan Islam sering lebih rentan sehingga keberhasilan bergantung pada kemampuan menegosiasikan keilmuan mereka ke dalam struktur kelembagaan berbasis ilmu modern (Latief et al., 2021). Dalam perspektif Bourdieu reproduksi sosial terjadi melalui pewarisan dan internalisasi modal budaya yang berbeda antar institusi pendidikan, sehingga ketimpangan status sosial terus berlanjut.

Dualisme pendidikan Indonesia berarti lebih dari sekadar dua jalur pendidikan. Dualisme ini menggambarkan dua konfigurasi kekuasaan yang berbeda dalam memproduksi dan mengakui keilmuan (Latief et al., 2021). Sekolah modern menjadi pusat dominasi modal budaya dan prestise sosial sementara pendidikan Islam terus berada dalam proses negosiasi legitimasi keilmuan baik di tingkat kelembagaan maupun praktik sosial. (Anas et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu reproduksi sosial berlangsung bukan hanya melalui pewarisan ekonomi tetapi juga melalui pewarisan modal budaya yang diatur oleh sistem pendidikan sehingga struktur keilmuan dan struktur sosial saling memperkuat. (Reay, 2022). Dengan demikian dualisme pendidikan menjadi mekanisme utama reproduksi legitimasi pengetahuan dan status sosial, di mana pendidikan modern mendominasi arena modal budaya sementara pendidikan Islam terus mencoba mendapatkan pengakuan yang setara.

C. Transformasi Legitimasi Pengetahuan Islam dalam Perspektif Pierre Bourdieu

Transformasi legitimasi pengetahuan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia pada era Reformasi berlangsung secara bertahap dan tidak serta-merta menghapus struktur dualisme pendidikan yang telah terbentuk sejak masa kolonial (Abrar & Zuliana, 2021). Meski demikian, periode Reformasi menghadirkan perubahan penting melalui berbagai kebijakan yang memberikan pengakuan formal terhadap posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023). Pengakuan tersebut

terlihat dari diakuinya madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meluasnya akses terhadap pendidikan tinggi keagamaan, serta kebijakan desentralisasi dan demokratisasi yang membuka ruang lebih besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara mandiri (Niswah et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian yang sah dari struktur pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai regulasi pendidikan lainnya (Latief et al., 2021). Perubahan ini menunjukkan bergesernya cara negara menempatkan dan mengakui keilmuan Islam dalam kebijakan serta kelembagaan pendidikan.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pengakuan formal terhadap pendidikan Islam dapat dipahami sebagai perubahan dalam struktur legitimasi simbolik (R. Susanti et al., 2025). Bourdieu menjelaskan bahwa legitimasi simbolik tidak hanya berkaitan dengan pengakuan negara, tetapi juga menyangkut penghargaan, kepercayaan, dan penerimaan yang diberikan masyarakat terhadap suatu bentuk pengetahuan atau lembaga pendidikan (Abrar & Zuliana, 2021). Dalam konteks ini, pendidikan Islam mulai memperoleh posisi yang lebih kuat sebagai bagian dari struktur keilmuan yang diakui secara nasional (Akhiruddin et al., 2025). Madrasah dan perguruan tinggi keagamaan tidak lagi berada di luar pusat produksi pengetahuan yang sah, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang memperoleh legitimasi negara. Meskipun demikian, perluasan legitimasi tersebut tetap berlangsung dalam struktur pendidikan yang masih didominasi oleh sekolah dan perguruan tinggi umum.

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pengetahuan Islam kini berkembang dalam ruang kelembagaan yang diatur oleh negara melalui regulasi, akreditasi, dan standar nasional pendidikan (Puspita et al., 2025). Namun, penguatan posisi kelembagaan ini tidak berarti berakhirnya dualisme pendidikan. Sebaliknya, pengakuan formal tersebut menjadi bagian dari proses negosiasi kekuasaan dalam arena pendidikan nasional (D. Susanti et al., 2025). Pendidikan Islam memang mulai memasuki arena kekuasaan simbolik yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh pendidikan umum, tetapi belum sepenuhnya mengubah struktur legitimasi keilmuan yang telah lama mapan.

Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan salah satu indikator penting dari transformasi legitimasi kelembagaan pendidikan Islam (Muwaffiqillah & Ningtyas, 2023). Perubahan ini menunjukkan perluasan orientasi akademik dari yang semula berfokus pada studi keislaman menuju pengembangan berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, sains, ekonomi, dan teknologi (Afrizal, 2022). Oleh karena itu, transformasi IAIN menjadi UIN tidak sekadar perubahan nomenklatur, melainkan juga mencerminkan perubahan epistemologis dan kelembagaan. Pendidikan Islam tidak lagi hadir sebagai sistem keilmuan yang terbatas pada studi agama, tetapi menjadi bagian dari struktur universitas modern yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu (Syarifurrohmah, 2021). Kondisi ini memungkinkan UIN menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus kemampuan akademik dan profesional yang dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, transformasi IAIN menjadi UIN menunjukkan pergeseran posisi pendidikan Islam dari wilayah yang relatif marginal menuju posisi yang lebih kuat dalam hierarki pendidikan tinggi nasional (Afrizal, 2022). UIN memperoleh modal budaya yang lebih luas melalui penguatan akreditasi, publikasi ilmiah, serta kerja sama akademik dengan berbagai institusi pendidikan umum (Sumanti, 2024). Perkembangan ini menunjukkan perubahan cara pengetahuan Islam diorganisasikan dan dinilai. Keilmuan Islam tidak lagi hanya bertumpu pada otoritas tradisi keagamaan, tetapi juga berpartisipasi dalam kompetisi akademik yang menggunakan standar ilmiah modern (Latief et al., 2021). Meskipun demikian, dominasi universitas umum dalam struktur pendidikan tinggi nasional masih tetap kuat sehingga hegemoni ilmu umum belum sepenuhnya tergeser.

Aspek lain yang menonjol dalam transformasi legitimasi pendidikan Islam adalah berkembangnya paradigma integrasi ilmu di madrasah dan UIN (Akhiruddin et al., 2025). Secara historis, integrasi ini diwujudkan melalui penguatan mata pelajaran dan program studi umum dalam kurikulum pendidikan Islam sehingga lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia profesional (Anas et al., 2026). Dalam perspektif Bourdieu, strategi tersebut dapat dipahami sebagai upaya reproduksi dan penguatan modal budaya melalui penyesuaian dengan standar pengetahuan modern yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional (Muthohirin et al., 2025). Akibatnya, madrasah dan UIN menjadi institusi yang menghasilkan modal budaya ganda, yaitu penguasaan ilmu keagamaan dan ilmu umum secara bersamaan. Modal ganda ini memberikan fleksibilitas bagi lulusan untuk bergerak dalam berbagai arena sosial dan profesional.

Secara lebih luas, Reformasi telah mengubah struktur legitimasi kelembagaan pendidikan Islam secara berkelanjutan (Latief et al., 2021). Berbagai kebijakan yang lahir pada periode ini memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian yang sah dari sistem pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023). Dampaknya tidak hanya terlihat pada penguatan status kelembagaan, tetapi juga pada meningkatnya akses lulusan lembaga pendidikan Islam terhadap pendidikan tinggi, lapangan kerja, dan berbagai peluang

profesional lainnya (Nurazizah et al., 2025). Dengan demikian, Reformasi mencerminkan perubahan dalam cara negara menegosiasikan posisi keilmuan Islam dalam struktur pendidikan nasional.

Dalam analisis Bourdieu, perubahan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam berhasil memperoleh legitimasi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya (Trisnani & Mariyam, 2026). Madrasah dan UIN kini memiliki peran yang semakin signifikan dalam menghasilkan lulusan yang diakui dalam sistem pendidikan tinggi dan pasar kerja modern (Muthohirin et al., 2025). Akan tetapi, penguatan posisi ini tidak menghilangkan dominasi sekolah modern dan perguruan tinggi umum sebagai pusat utama produksi pengetahuan yang sah (Iris, 2025). Dengan kata lain, pendidikan Islam telah memperoleh ruang yang lebih luas, tetapi masih beroperasi dalam struktur kekuasaan keilmuan yang sebagian besar dibentuk oleh paradigma ilmu umum.

Secara keseluruhan, transformasi legitimasi pengetahuan Islam pada era Reformasi menunjukkan pergeseran bertahap dari posisi marginal menuju posisi yang lebih kuat dalam struktur pendidikan nasional (Yasin & Tamim, 2026). Dari perspektif Bourdieu, perubahan ini mencerminkan perluasan legitimasi simbolik dan kelembagaan pendidikan Islam. Sementara itu, dalam perspektif Barth, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa validitas keilmuan Islam semakin ditentukan oleh standar akademik modern, seperti publikasi ilmiah, akreditasi, dan pengakuan institusional, selain tetap mempertimbangkan otoritas keagamaan (Hayadin et al., 2025). Integrasi ilmu yang berkembang di madrasah dan UIN semakin memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem keilmuan modern. Namun, berbagai perubahan tersebut belum sepenuhnya menghapus dualisme epistemologis yang telah lama mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam memang telah memperoleh legitimasi yang lebih luas, tetapi masih beroperasi dalam struktur keilmuan nasional yang didominasi oleh paradigma pendidikan umum.

KESIMPULAN

Dualisme pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena spontan. Ia merupakan konstruksi historis yang bermula dari politik pendidikan kolonial Belanda, dipertahankan oleh sistem pendidikan nasional pasca-kemerdekaan, dan kemudian menyesuaikan diri dalam kebijakan era reformasi. Dalam konfigurasi ini pendidikan modern memperoleh legitimasi simbolik yang dominan sebagai pusat produksi dan redistribusi modal budaya. Sementara itu pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, mengalami subordinasi epistemologis yang berkelanjutan meskipun posisi kelembagaannya cenderung menguat pada masa reformasi.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, dualisme itu terus berfungsi sebagai mesin reproduksi struktur legitimasi pengetahuan. Sekolah modern menjadi arena dominasi modal budaya dan simbol prestise sosial. Ilmu agama ditempatkan pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Dari perspektif reproduksi sosial menurut Bourdieu, struktur ini memperkuat ketimpangan status sosial. Lulusan sekolah modern lebih mudah mengakses birokrasi, profesi, dan modal budaya bernilai tinggi. Sebaliknya lulusan pendidikan Islam harus terus menegosiasikan legitimasi keilmuan mereka dalam kerangka yang ditetapkan oleh sekolah modern.

Melihat transformasi pada era reformasi, legitimasi keilmuan Islam memang berubah secara bertahap melalui pengakuan formal, perkembangan IAIN menjadi UIN, dan integrasi ilmu. Namun perubahan kelembagaan ini tidak serta merta menghapus struktur kekuasaan ilmiah yang didominasi ilmu umum. Dengan kata lain posisi kelembagaan pendidikan Islam menjadi lebih kuat, tetapi dualisme epistemologis tetap bertahan karena sekolah modern masih berfungsi sebagai pusat legitimasi simbolik dan reproduksi modal budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Maftuh, & Rofiq, M. (2026). From Islamic Boarding Schools To Policy: The Influence Of Religious Education Elites In Power Elite Theory. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–52.
- Abrar, M., & Zuliana, P. (2021). Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Bangunan Sistem Pendidikan Nasional. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 54–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6210>
- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(4), 196–210.
- Afrizal, A. (2022). Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia (Kasus STAIN, IAIN, UIN Dan Perguruan Tinggi Islam). *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 18–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.51214/bip.v2i1.378>
- Akhiruddin, Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2025). Cultural Capital and Educational Inequality: A Critical Analysis of Bourdieu's Thought in the Context of Indonesian Education. *IJOLEH*:

- International Journal of Education and Humanities*, 4(2), 256–270.
- Amka, H. (2024). *Filosofi Pendidikan Indonesia*.
- Anas, M., Sebgag, S., Syamsi, M., & Alai, A. (2026). Religious Families as Sources of Islamic Cultural Capital : Social Analysis in Islamic Religious Education , Analysis of Bourdieu's Social Theory. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 101–114.
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>
- Asiah, S., Huda, M., Muttaqin, S., & Saepudin, D. (2023). Islamic Education Policy in Indonesia in the Age of Reformation. *IGCIIS*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2329067>
- Atli, C. S., & Cimrin, F. K. (2023). A Qualitative Study of the Elements of Symbolic Violence in Official Education Documents. *Journal of Qualitative Research in Education*, 33, 249–279. <https://doi.org/10.14689/enad.33.879>
- Chande, A. (2023). Global Politics of Knowledge Production : The Challenges of Islamization of Knowledge in The Light of Tradition Vs Secular Modernity Debate. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 271–289.
- Delvia, M., Samad, D., Mamad, F. S., Wahyuni, D., & Sartini, T. (2025). Evolusi Madrasah di Indonesia : Analisis Historis Komparatif terhadap Dinamika Kelembagaan , Kurikulum , dan Pedagogi (1945 – 2025). *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 23(01), 239–260.
- Fatmawati, I., & Maftuh. (2026). Ketimpangan Akses Pendidikan Agama dan Implikasinya terhadap Mobilitas Sosial. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5971–5980.
- Fatoni, A., Prasetyowat, F., & Sutiah. (2026). Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia : Analisis Historis Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 08(01), 117–130.
- Fauzi, A., Abidin, Z., Ramadan, H., Mukarom, Z., Studi, P., Islam, P., Islam, U., & Sunan, N. (2026). Habitus di arena simbolik : dekonstruksi feodalisme dan konversi modal simbolik dalam praktik khidmah santri. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 12(1), 92–107.
- Gamsu, S. (2022). Financing elite education : Economic capital and the maintenance of class power in English private schools. *The Sociological Review*, 70(6), 1240–1266. <https://doi.org/10.1177/003802612211076202>
- Gauchat, G. W. (2023). The Legitimacy of Science. *Annual Review of Sociology*, 49(1), 263–279.
- Habibi, N., & Sholikha, M. (2025). Kontekstualisasi Teori Bourdieu dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 261–273. <https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.397>
- Hayadin, Niam, K., Munawiroh, & Lukens-Bull, R. (2025). Contemporary Changes in Islamic Higher Education in Indonesia: Dynamic Encounter between Modernisation and Tradition. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(3), 189–200.
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia di Era Reformasi. *FITRAH Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85–95.
- Heleta, S., & Chasi, S. (2024). Curriculum Decolonization and Internationalization : A Critical Perspective from South Africa. *Journal of International Students*, 14(2), 75–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32674/jis.v14i2.6383>
- Hidayati, N., Muhid, A., & Sahri, I. K. (2023). Educational Dualism in Indonesia : Systematic Literature Review. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(2), 130–146.
- Husaeni, M. F. (2023). Critical Literature Review on Moral Education System in Indonesia : How Islamic Education and Pancasila Education Monopolize Morality in Schools. *Muslim Education Review*, 2(1), 65–98.
- Iris, R. (2025). Peran Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dalam Menyebarkan Ilmu Pengetahuan di Masa Kejayaan Islam. *SURAU : Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–11.
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Kettley, N., & Murphy, C. (2021). Augmenting excellence , promoting diversity ? Preliminary design of a foundation year for the University of Cambridge. *British Journal of Sociology of Education*, 42(3), 419–434. <https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1886050>
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Kusdiana, A. (2023). The Dutch Colonial Policies on Religion and Education in the Dutch Indies (1889-1942). *Khazanah Sosial*, 5(3), 578–585. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i3.27429>
- Kusuma, M. G., Musthofa, F. Z., & Khuriyah. (2024). Konsep kurikulum madrasah, sekolah, dan pesantren

- di indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 1–20.
- Kutsi, D. J. A., & Arifin, Z. (2023). Dekolonialisasi Pendidikan: Studi Kritis Hegemoni Keilmuan Barat di Pesantren Modern. *Jurnal Partisipatoris*, 5(1), 157–171.
- Latief, S., Sari, Y. A., Yusuf, M., Armila, A., & Hidayat, E. (2021). The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia. *IJoASER*, 4(2), 86–99.
- Lumbard, J. E. B. (2025). Islam , coloniality , and the pedagogy of cognitive liberation in higher education. *Teaching in Higher Education*, 30(6), 1409–1419. <https://doi.org/10.1080/13562517.2025.2468974>
- Mardatillah, F., Gumilang, R. M., Wahyudi, M. A., Rawanita, M., & Muhammad, M. (2025). Epistemological Reconstruction of Islamic Education : Developing a Transformative Pedagogical Model to Foster Creativity. *The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 13(2), 1071–1094.
- Mubadillah, R. (2024). Educational Policy and Islamic Teaching in Indonesia in The Post- Independence Period. *EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education*, 6(2), 75–85.
- Mubarak, A. K., Hadi, S., & Anshari, A. (2026). History and Institutions Implementing Islamic Religious Education in Indonesia. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/kasyafa.v3i1.146>
- Muthohirin, N., Aziz, A. A., Mahfud, C., Mukhlis, F., & Hikmawati, R. (2025). Islamic Sciences In Transition: Post-Reformation Developments In Indonesia’s State Islamic Universities. *Ulumuna*, 29(1), 429–460.
- Muwaqqillah, M., & Ningtyas, T. (2023). Intelektualitas Dalam Masa Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Kediri. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 212–218.
- Niswah, C., Pratama, C., Rifany, I. N., & Rigi, A. K. (2025). Perkembangan Lembaga Pendidikan Madrasah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah Pendidikan. *EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan*, 5(2), 74–83.
- Nurazizah, E., Astria, G., & Faclakup, F. (2025). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara : Studi Literatur Tentang Pondok Pesantren dan Madrasah. *Jurnal Miftahul Ilmi : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 117–131.
- Nurtawab, E., & Wahyudi, D. (2022). Restructuring Traditional Islamic Education in Indonesia: Challenges for Pesantren Institution. *Studia Islamika*, 29(1), 55–81.
- Pamungkas, O. Y., Suroso, E., Suhanah, S., Siswayanti, N., Qohar, A. F., & Hendrawati, T. (2026). Negotiating Cultural Values in Pesantren as Islamic Educational Institutions : A Case Study from Eastern Indonesia. *Journal of Intercultural Communication*, 26(1), 73–83.
- Perwez, V. (2025). Social construction of knowledge and critical pedagogy : A theoretical understanding. *International Journal of Sociology and Humanities*, 7(1), 407–409. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.33545/26648679.2025.v7.i1e.195>
- Pirdaus, D. I., Cahyandari, R., & Salih, Y. (2023). Constitutional Values, Legal Politics, and Political Stability: A Comparative Analysis in the Post-Authoritarian Context of Indonesia. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 1(4), 64–69.
- Purba, R. (2025). Kritik Hermeneutik Filsafat Islam atas Dominasi Positivisme dalam Pendidikan Madrasah di Indonesia. *Al-Qarawiyyin : Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 193–207.
- Puspita, A., Jannatul, T., Purnawijaya, M. R., Fadhil, A., & Jakarta, U. N. (2025). Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia : Kajian Historis Terhadap Transformasi Lembaga dan Metodenya. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 02(02), 1228–1239.
- Rahmadani, S. (2023). Social and Cultural Capital in Islamic Religious Education : Case Study of Madrasah Diniyah Nurul Huda Sarimulyo Blora. *Komunitas*, 15(1), 14–26. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i1.44453>
- Reay, D. (2022). The more things change the more they stay the same’: The continuing relevance of Bourdieu and Passeron’s Reproduction in Education, Society and Culture. *Revista Española De Sociología*, 31(3), 1–20. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.116>
- Ridwan, A. (2022). The Changing Roles of Ulama and the Evolution of Islamic Schools : Some Insights from Moroccan and Indonesian Cases. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 10(2), 149–162.
- Rizal, M., Iskandar, I., & Suryadi, A. (2024). Analisis Literatur: Mutu Pendidikan Islam Ditinjau Dari Praktik Dualisme Pendidikan Nasional. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 8848(2), 665–677.
- Rodin, R., Hidayah, J., & Harmi, H. (2025). Manajemen Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia : Sistematis Review. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 35–52.
- Sumanti, S. T. (2024). The Evolution of Islamic Educational Institutions in North Sumatra Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–19.

- Suprajitno, S. (2022). Chinese Language Investment : Pesantren and Social Reproduction Challenges *. *Jordan Journal of Modern Languages and Literatures*, 14(4), 755–774.
- Susanti, D., Asha, L., Studi, P., & Pendidikan, M. (2025). Konteks Mayoritas Vs. Minoritas: Implikasinya Terhadap Status Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia dan Australia. *Jurnal Pendidikan PKMPI*, 1(1), 11–20.
- Susanti, R., Wahyuningsih, F., Aprison, W., Rahman, A., & Harto, B. (2025). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Kebijakan, Implementasi, Dan Tantangan Masa Depan. *Irfani*, 21(1), 1337–1348.
- Syaifurrohman, A. (2021). Transformasi IAIN Menjadi UIN Sebuah Dilema Pendidikan Tinggi Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 22(2), 167–186. <https://doi.org/10.24090/JPA.V22I2.2021.PP167-186>
- Syarif, F., Maulana, A., Nafisa, R. B., Putri, M., & Ahmad, A. (2025). Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda dan Implikasinya Terhadap Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 617–634.
- Tandiangga, P., & Allolayu, A. (2022). Institusi pendidikan sebagai sarana reproduksi budaya dan sosial. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 904–909.
- Thang, N. Van, Phuc, N. H., Trong, D. Van, Kiet, L. H., & Hiep, T. X. (2024). Another Perspective in the Education of Netherlands in Indonesia During Colonial Period (1799 - 1942). *Journal of Educational and Social Research*, 14(4), 413–429.
- Trisnani, E. E., & Mariyam, S. (2026). Tradisi Pesantren Relasinya dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 976–987.
- Wafa, A. N., Safia, G. F. N., & Astuti, N. Y. (2025). Pendidikan Islam di Bawah Bayang Kolonialisme : Kurikulum , Tantangan dan Perkembangannya. *EDUSHOPIA : Journal of Progressive Pedagogy*, 2(2), 153–163.
- Warisno, A., Andari, A. A., & Anshori, M. A. (2023). The Evolution of Islamic Education Institutions in Indonesia. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 8(1), 164–174.
- Xie, F. (2025). How does cultural capital influence academic achievement in the Chinese context? A systematic literature review. *Sage Open*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440251315980>
- Yasin, M., & Tamim, A. (2026). Genealogi dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darussolah Sangatta Selatan. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 38–50.
- Yentür, D. B. (2024). Post-Colonial Education Policies and Cultural Integration : A Comparison of Indonesia and Turkey. *Dinamika Ilmu*, 24(June), 91–109.